

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menjadi suatu kesimpulan bahwa DPMPTSP Kabupaten Batang telah menerapkan 9 prinsip *good governance* dalam pelayanan perijinannya yaitu adanya partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang jelas, keterbukaan informasi atau transparansi, daya tanggap pelayanan, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, pelayanan yang efektif dan efisien, berakuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada publik, dan bervisi strategis. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut dalam praktiknya sudah diterapkan dengan cukup baik melalui adanya pemenuhan hak masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai perijinan khususnya mengenai tata ruang, kemudian adanya sistem OSS yang memudahkan pelayanan perijinan dan sinergi antara masyarakat dan DPMPTSP Kabupaten Batang untuk mendukung penerapan *good governance*. Meski demikian, masih ditemukan kekurangan atau kendala seperti sistem OSS yang belum sempurna khususnya untuk perijinan tata ruang dan adanya pandemi covid-19 yang berdampak kepada pegawai DPMPTSP Kabupaten Batang, pembatasan waktu pelayanan, dan juga penurunan tingkat investasi dan perijinan dibandingkan tahun sebelumnya serta kegiatan offline promosi penanaman modal yang tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu adapula faktor pendukung dan penghambat penerapan *good governance* di DPMPTSP Kabupaten Batang. Faktor yang mendukung adanya penerapan prinsip *good governance* DPMPTSP Kabupaten Batang adalah: (1) Pelayanan online berbasis OSS, (2) Sarana dan Prasarana yang Memadai, (3)

Sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan faktor yang menghambat adanya penerapan prinsip good governance DPMPTSP Kabupaten Batang tersebut adalah: (1) Adanya Pandemi Covid-19, (2) Belum Sempurnanya Pelayanan online berbasis OSS, dan (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia Lulusan Programmer.

Sehingga berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa good governance dapat terwujud melalui pelayanan publik yang baik pula. Meskipun dalam penerapannya terdapat kendala, setidaknya prinsip-prinsip good governance dapat terimplementasi dengan baik.

4.2 Saran

Rekomendasi saran oleh peneliti antara lain:

1. Perekrutan SDM yang berkompeten dalam bidang programmer.

Hal ini diperlukan agar website DPMPTSP Kabupaten Batang dapat terpelihara dengan baik dan menyajikan data-data secara cepat dan akurat.

Selain itu, perekrutan SDM programmer tersebut dapat membantu bidang sistem informasi untuk mempermudah dalam menyajikan data secara otomatis.

2. Mengoptimalkan website dan sosial media DPMPTSP Kabupaten Batang sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, dan promosi penanaman modal serta rajin untuk update informasi-informasi terbaru seputar pelayanan kepada masyarakat.